

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENANGANAN JURU PARKIR
LIAR DI KAWASAN WISATA KOTA SURABAYA**

Muhammad Ilham Maulana
NPP. 32.0543

Asdaf Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: milhammaulana@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mohammad Zaki Taufik, AP, M,Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Globalization has driven the standardization of public services at the international level. Governments are required to improve the quality of their services to align with global standards. Synergy among government organizations is needed to adopt and implement best practices in public service delivery from various countries. Efficient and effective public services have become one of the key factors in a country's competitiveness. The issue of illegal parking, which remains widespread, not only disrupts public order but also hinders the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD). **Purpose:** *This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Department of Transportation in efforts to establish order and public tranquility in the parking sector of Surabaya City.* **Method:** *This study employs a qualitative approach with data collection methods including interviews, observation, and documentation. The synergy theory used refers to Doctoroff's perspective, which encompasses four main dimensions: effective communication, feedback, trust, and creativity.* **Results/Findings:** *The results of the study indicate that communication between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Department of Transportation has been established through socialization and joint patrols, although implementation has not been evenly distributed across all parking points. Feedback is evident in coordination forums and responses to public complaints. Inter-agency trust is manifested through clear division of duties, while creativity is reflected in innovative programs such as providing insurance for officially registered parking attendants.* **Conclusion:** *Although synergy has been established, challenges still arise, particularly the limited human resources and the low legal awareness among illegal parking attendants. Therefore, strengthening continuous coordination and encouraging active community participation are recommended strategies to address the issue of illegal parking in Surabaya City.*

Keywords: Civil Service Police Unit, Department of Transportation, Illegal Parking, Public Order, Synergy.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan parkir liar di Kota Surabaya masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan ketertiban umum dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun regulasi telah diterapkan, praktik parkir liar tetap marak terjadi karena lemahnya pengawasan dan sinergitas antarorganisasi pemerintah

terkait. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman di bidang perpustakaan Kota Surabaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori sinergitas yang digunakan mengacu pada pandangan Doctoroff, yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah terjalin dalam bentuk sosialisasi dan patroli gabungan, walaupun implementasinya belum merata di seluruh titik parkir. Umpan balik terlihat dalam forum koordinasi dan respon terhadap pengaduan masyarakat. Kepercayaan antar lembaga diwujudkan dalam pembagian tugas yang jelas, sedangkan kreativitas tampak dari program-program inovatif seperti pemberian asuransi bagi juru parkir resmi. **Kesimpulan:** Meski sinergitas telah berjalan, kendala tetap muncul, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran hukum dari juru parkir liar. Oleh karena itu, penguatan koordinasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi strategi yang disarankan dalam mengatasi persoalan parkir liar di Kota Surabaya. **Kata Kunci:** Dinas Perhubungan Ketertiban, Parkir Liar, Sinergitas, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standar pelayanan publik dalam era globalisasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanannya sesuai standar internasional. Salah satu upaya peningkatan tersebut adalah melalui sinergitas antarinstansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan permasalahan publik seperti parkir liar (Stiglitz, 2002). Pelayanan publik merupakan inti dari fungsi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Menurut Prabowo (2022), pelayanan publik tidak hanya sekadar penyediaan layanan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas birokrasi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi serta implementasi prinsip good governance. Prabowo menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan transformasi struktural dan kultural dalam birokrasi, termasuk penguatan kapasitas aparatur, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik yang responsif dan transparan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Menurut Ilham dan Rahman (2025), keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sangat bergantung pada sinergi antarlembaga penegak peraturan daerah, terutama dalam membangun pola koordinasi yang konsisten dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi seperti antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam menangani juru parkir liar perlu didukung oleh sistem kerja yang terintegrasi serta komitmen bersama dalam penegakan hukum di ruang publik.

Fenomena *overtourism* di kawasan wisata kota besar seperti Surabaya memicu lonjakan kendaraan, yang tidak diimbangi dengan penyediaan lahan parkir memadai (UNWTO, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah kendaraan di Surabaya meningkat rata-rata 5,4% per tahun, namun hanya 60% kebutuhan parkir yang dapat dipenuhi. Akibatnya, praktik parkir liar, terutama di kawasan wisata seperti Kota Lama Surabaya, semakin marak. Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya, seperti penertiban gabungan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian. Namun, efektivitas upaya tersebut belum maksimal. Menurut Bagian

Organisasi Pemkot Surabaya (2023), hanya 60% operasi dilakukan secara terkoordinasi, sisanya masih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergitas antarinstansi dalam implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 yang melarang parkir tanpa izin. Sinergitas yang baik mencakup komunikasi, kepercayaan, umpan balik, dan kreativitas dalam program pelayanan publik (Doctoroff dalam Darlis & Mahyudin, 2022).

Juru parkir liar tidak hanya menyebabkan kerugian PAD, diperkirakan mencapai Rp50 miliar/tahun, tetapi juga menimbulkan gangguan keamanan dan estetika kota. Oleh karena itu, solusi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan profesionalisme dan koordinasi antarinstansi, sementara masyarakat dituntut untuk taat hukum dan menggunakan fasilitas parkir resmi (Noviantoro & Rosando, 2023). Evaluasi kuantitatif terhadap kebijakan publik, seperti yang dilakukan oleh Ma et al. (2025) dalam konteks penanggulangan kekerasan di tempat kerja rumah sakit di Tiongkok, menunjukkan pentingnya analisis sistematis terhadap substansi kebijakan guna mengukur efektivitas dan kekuatan implementasinya. Pendekatan serupa dapat diterapkan dalam menganalisis regulasi dan praktik sinergitas antarinstansi, khususnya dalam penanganan masalah sosial seperti parkir liar, untuk memastikan bahwa kolaborasi yang dibangun memiliki dasar kebijakan yang kuat dan dapat dievaluasi secara objektif.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam penanganan juru parkir liar. Tujuannya adalah menciptakan kawasan wisata yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Fenomena maraknya juru parkir liar di kawasan wisata Kota Surabaya menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan praktik perparkiran yang tidak sesuai aturan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan parkir liar dari perspektif penegakan hukum oleh satu instansi tertentu, seperti Dinas Perhubungan atau Satuan Polisi Pamong Praja secara terpisah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek sanksi, sosialisasi peraturan, atau persepsi masyarakat terhadap penertiban parkir liar.

Namun, hingga saat ini masih sangat terbatas kajian yang menyoroti secara mendalam bagaimana bentuk sinergitas antarorganisasi perangkat daerah, khususnya antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, dalam menangani masalah juru parkir liar secara terpadu. Padahal, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mengefektifkan pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap pelaku parkir liar, terutama di kawasan wisata yang menjadi etalase kota dan berkontribusi terhadap citra daerah.

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penting bagi peneliti untuk melakukan kajian mengenai sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menangani juru parkir liar di kawasan wisata. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terkait kolaborasi antarinstansi dalam pengelolaan ketertiban umum di ruang publik, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan yang aplikatif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi telah dilakukan untuk membahas peran dan sinergitas antarinstansi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ketertiban umum, termasuk pengelolaan parkir liar dan kebersihan wilayah perkotaan. Shobah (2023) meneliti sinergitas antara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan di Kabupaten Demak. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan bersih. Sementara itu, Si *et al.* (2025) melalui penelitiannya yang menyoroti pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap praktik parkir liar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran. Di Kota Makassar, Ikhsan *et al.* (2023) mengkaji bentuk kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar. Penelitian ini menekankan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas penertiban. Putri dan Saini (2021) juga meneliti peran Satpol PP dalam menangani pelanggaran parkir liar di Kota Padang dan menemukan bahwa kendala sumber daya manusia serta koordinasi dengan dinas terkait menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, Firdani (2020) meneliti efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 dalam mengatasi pungutan liar oleh juru parkir. Ia menggunakan pendekatan hukum Islam dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan perda tersebut belum sepenuhnya efektif karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya edukasi terhadap masyarakat..

Selain penelitian dari IPDN, beberapa jurnal internasional juga membahas topik serupa. Smith *et al.* (2020) dalam jurnal *Urban Studies* meneliti kolaborasi antara penegak hukum dan otoritas transportasi dalam mengelola parkir liar di kota-kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antarinstansi dapat mengurangi pelanggaran parkir liar secara signifikan. Jones dan Brown (2019) dalam jurnal *Transport Policy* menyoroti pentingnya pendekatan terpadu antara Satpol PP dan Dishub dalam penanganan parkir liar. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara kedua instansi dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir. Lee dan Kim (2021) dalam jurnal *Journal of Urban Planning and Development* meneliti efektivitas kebijakan penanganan parkir liar di Seoul. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Dishub dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengurangi pelanggaran parkir liar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada peran masing-masing instansi secara terpisah atau membahas pengelolaan sampah dari aspek teknis dan partisipasi masyarakat. Berbeda dari itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menganalisis secara mendalam bentuk koordinasi, kolaborasi, serta tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh dua instansi penegak perda dalam konteks pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis melalui penyusunan rekomendasi strategis yang berbasis pendekatan sinergitas kelembagaan, yang belum banyak diulas dalam studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur dalam bidang administrasi publik dan tata kelola lingkungan, tetapi juga menawarkan solusi aplikatif dan kontekstual bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah secara kolaboratif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk sinergitas

antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dalam menangani praktik juru parkir liar di kawasan wisata Kota Surabaya. Tujuan ini mencakup identifikasi pola kerja sama yang dilakukan kedua instansi, mekanisme koordinasi dalam penertiban parkir liar, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam membangun sinergitas antarinstansi, baik dari aspek struktural, kultural, maupun teknis operasional.

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sinergitas tersebut mampu menciptakan ketertiban perparkiran di kawasan wisata, meningkatkan kenyamanan pengunjung, serta memperkuat citra Kota Surabaya sebagai destinasi wisata yang tertib dan ramah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan ketertiban umum yang lebih terintegrasi, berbasis kolaborasi lintas sektor.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menangani permasalahan juru parkir liar di kawasan wisata. Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti menjelajahi secara kontekstual proses koordinasi, pembagian tugas, dan hambatan yang dihadapi kedua instansi, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data empiris dari lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi temuan-temuan teoritis berdasarkan realitas sosial yang ada (Creswell, 2011). Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, arsip, laporan kegiatan, dan literatur ilmiah lainnya (Simangunsong, 2016). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, *snowball sampling*, dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan dan otoritas dalam kebijakan penertiban parkir liar, yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan informan kunci, serta Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Mereka dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta memiliki wawasan menyeluruh tentang koordinasi antarinstansi. Selanjutnya, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menjangkau juru parkir dan masyarakat yang relevan dengan penelitian berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, sedangkan *accidental sampling* diterapkan untuk memperoleh data tambahan dari juru parkir dan masyarakat yang ditemui secara kebetulan namun memiliki pengetahuan tentang fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (Esterberg, 2002), observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi terhadap peraturan daerah dan laporan kegiatan. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar cek dokumentasi untuk mengarahkan proses pengumpulan data secara sistematis (Sugiyono, 2013). Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber, peningkatan ketekunan peneliti, penggunaan bahan referensi, validasi melalui member check, serta diskusi dengan mitra sejawat. Pendekatan dan teknik yang digunakan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat menggambarkan realitas

empiris secara akurat dan memberikan kontribusi yang kuat dalam pengambilan kebijakan publik yang efektif dan berbasis sinergitas kelembagaan. Penelitian dilakukan di Kawasan wisata Kota Surabaya dari Agustus 2024 hingga Juni 2025

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Surabaya terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, di ujung timur Pulau Jawa. Dengan posisi strategis di jalur utama transportasi darat, laut, dan udara, kota ini menjadi penghubung penting antara wilayah barat dan timur Indonesia. Secara geografis, Surabaya terletak antara 7°9'–7°21' Lintang Selatan dan 112°36'–112°54' Bujur Timur, yang mempengaruhi iklim tropis kota ini. Wilayah Surabaya mencakup luas sekitar 350,54 km² dan berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, serta Kabupaten Gresik di barat. Topografi kota ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian 2 hingga 6 meter di atas permukaan laut, yang membuat beberapa wilayah rawan banjir, terutama pada musim hujan dan pasang air laut. Sungai-sungai besar seperti Sungai Kalimas dan kanal-kanal buatan memiliki peran penting dalam sistem pengairan dan drainase kota ini.

Kondisi geografis Surabaya mendukung peranannya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan jasa di kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di kota ini menjadi salah satu pelabuhan utama dan tersibuk di Indonesia, mendukung akses perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, letaknya yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa melalui Selat Madura memperkuat potensi kemaritiman kota ini.

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, jumlah penduduk telah mencapai lebih dari 3 juta jiwa, dengan kepadatan lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi. Hal ini menjadikan Surabaya sebagai salah satu kota dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia. Komposisi penduduknya sangat beragam, dengan suku bangsa seperti Jawa, Madura, Tionghoa, Sunda, Batak, dan lainnya, menciptakan suasana multikultural yang dinamis. Sebagian besar penduduk Surabaya berada pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), menjadikannya pusat tenaga kerja potensial, baik di sektor formal maupun informal. Dalam hal pendidikan, Surabaya dikenal sebagai kota dengan kualitas pendidikan yang cukup baik, didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi kota. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menimbulkan tantangan besar, seperti kebutuhan akan perumahan, transportasi, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, pemerintah kota terus berupaya menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika demografi yang ada, agar pertumbuhan kota tetap berjalan secara berkelanjutan.

3.1. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Dalam Menangani Juru Parkir Liar

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 21 Januari 2024 dan berlokasi di dua instansi utama yang terlibat langsung dalam penanganan masalah parkir liar di Kota Surabaya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis kedua instansi tersebut dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di kawasan wisata kota melalui penertiban juru parkir liar. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti secara aktif melakukan pengumpulan data dan informasi langsung dari lapangan untuk mendapatkan

gambaran konkret mengenai implementasi kebijakan dan koordinasi antarinstansi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap aktivitas penertiban, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi dari arsip dan dokumen resmi guna memperkuat validitas data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori sinergitas yang dikemukakan oleh Doctoroff (1977), yang dipandang relevan untuk menilai hubungan kerja sama antarorganisasi dalam konteks pemerintahan daerah. Teori ini membantu peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah terjalin dengan efektif. Penerapan teori ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sinergitas yang dimaksud mampu mengatasi permasalahan parkir liar secara berkelanjutan. Teori Doctoroff menitikberatkan pada empat dimensi utama yang menjadi indikator sinergi, yaitu komunikasi efektif antarinstansi, mekanisme umpan balik, tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kreativitas dalam menciptakan solusi kolaboratif. Keempat dimensi ini menjadi pijakan utama dalam mendeskripsikan dan menganalisis temuan penelitian, serta dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan publik secara lebih terintegrasi.

3.1.1 Komunikasi yang Efektif

Penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir di kawasan wisata berjalan dengan baik melalui koordinasi rutin, patroli gabungan, dan pendekatan humanis-persuasif. Kedua instansi ini telah menjalin komunikasi yang harmonis dengan juru parkir, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pemantauan rutin, yang bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman di kawasan tersebut. Namun, meskipun komunikasi antara instansi terjalin dengan baik, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Menurut Bunda dan Tjenreng (2025), analisis terhadap efektivitas kebijakan pengaduan publik dalam pelayanan administrasi publik menunjukkan bahwa sistem pengaduan yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan partisipasi masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya regulasi yang mengatur penindakan terhadap juru parkir liar, yang menyebabkan Satpol PP hanya dapat memberikan surat peringatan tanpa tindakan lanjut yang lebih tegas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas transportasi untuk mendukung patroli, menjadi kendala dalam memperkuat sinergi antara instansi. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran juru parkir untuk mendaftarkan diri sebagai juru parkir resmi, yang disebabkan oleh penghasilan lebih besar yang mereka peroleh di sektor informal.

Meskipun pendekatan edukatif dilakukan, implementasinya masih belum merata, terutama di kawasan wisata yang tidak sering mendapatkan laporan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme pengawasan yang jelas dengan tiga tahap (persiapan, pelaksanaan, evaluasi), jangkauan edukasi yang terbatas dan hambatan regulasi masih mengurangi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun komunikasi antar instansi telah terjalin dengan baik, keberhasilan penertiban parkir liar masih terkendala oleh faktor eksternal yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

3.1.2 Umpan Balik

Dimensi Umpan balik memiliki peran penting dalam proses komunikasi, baik dalam lingkup personal, kelompok, maupun organisasi. Keberadaan umpan balik membantu menilai apakah target dan hasil yang diharapkan telah tercapai serta memberikan acuan untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks pengelolaan parkir di Kota Surabaya, umpan balik terlihat melalui sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan, yang melibatkan beberapa indikator penting.

Pertama, kejelasan umpan balik yang disampaikan melalui rapat koordinasi antar instansi, seperti yang dilakukan antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian. Rapat ini berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan, seperti ketegangan antara juru parkir liar dan masyarakat. Melalui forum ini, solusi terhadap masalah dapat dibahas dan diterapkan. Menurut Affan Abdillah, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan, rapat koordinasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara persuasif dan tepat waktu.

Kedua, pemberian umpan balik dalam bentuk penghargaan dan insentif juga memainkan peran penting. Pemerintah Kota Surabaya memberikan berbagai fasilitas kepada juru parkir resmi, seperti kartu identitas, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi parkir. Umpan balik ini tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai dorongan bagi juru parkir untuk tetap termotivasi dan berkinerja baik.

Terakhir, spesifitas umpan balik terlihat dalam pengawasan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Pemantauan terhadap aktivitas parkir di kawasan wisata dilakukan setiap akhir pekan, meskipun pengawasan ini belum sepenuhnya merata di semua area. Pengawasan yang konsisten akan memastikan bahwa masalah parkir, baik terkait dengan juru parkir liar maupun pengelolaan parkir lainnya, dapat ditangani dengan baik.

Secara keseluruhan, meskipun umpan balik dalam pengelolaan parkir Kota Surabaya telah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam hal konsistensi dan meratanya implementasi di seluruh kawasan wisata.

3.1.3 Membangun Kepercayaan

Kepercayaan Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di sektor perparkiran, sinergitas antara Satpol PP Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan menuntut terjalinnya komunikasi dua arah yang terbuka, rasa saling pengertian, penerimaan, serta kerjasama yang solid guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu elemen kunci dalam proses sinergi tersebut adalah kepercayaan, yang menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif. Kepercayaan memegang peran sentral dalam membangun relasi antarindividu maupun antarlembaga karena mencakup keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan bertindak dengan integritas, kejujuran, serta dapat diandalkan. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Surabaya berupaya menumbuhkan rasa saling percaya demi menghadirkan ketertiban perparkiran yang diakui oleh masyarakat.

Kepercayaan antarinstansi ini diperkuat melalui pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, M. Fikser, AP., M.M., pada 8 Januari 2025, yang menegaskan bahwa Satpol PP memberikan kepercayaan penuh kepada Dinas Perhubungan dalam mendukung pelaksanaan tugas menjaga ketertiban parkir di Kota Surabaya. Ia menjelaskan bahwa personel Dinas Perhubungan telah melalui proses seleksi ketat dan dinilai layak dalam memastikan pengelolaan fasilitas parkir berjalan sesuai harapan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan, Affan Abdillah, mengungkapkan

bahwa bentuk kepercayaan ini tercermin dalam berbagai bentuk dukungan, seperti pendampingan penertiban, pengawasan, hingga sosialisasi kepada juru parkir di lapangan. Ia berharap bahwa kepercayaan yang telah dibangun akan terus memupuk kerjasama yang baik dan mendorong peningkatan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam mengemban tugas.

Lebih jauh, kepercayaan antara kedua instansi ini diwujudkan melalui kolaborasi nyata dalam menjaga ketertiban parkir di Kota Surabaya. Tidak hanya sebatas antar-lembaga, kepercayaan juga perlu dibangun dengan masyarakat, agar publik memiliki keyakinan terhadap kesungguhan kedua pihak dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan parkir yang aman dan tertib. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk membuka akses informasi serta menerima kritik dan aspirasi masyarakat melalui layanan pengaduan yang aktif selama 24 jam, baik melalui call center, WhatsApp, maupun media sosial. Selain itu, juru parkir resmi dibekali dengan karcis sebagai bentuk transparansi pembayaran retribusi, yang sekaligus menegaskan kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Dukungan dari masyarakat pun terlihat dalam wawancara peneliti dengan seorang pengguna parkir bernama Arum di sekitar Jalan Tunjungan pada 11 Januari 2025. Arum mengapresiasi upaya Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam menyediakan informasi perparkiran melalui media sosial, yang dinilai cukup aktif dalam menyebarkan informasi dan menampung pengaduan masyarakat. Namun demikian, ia juga menyoroti masih adanya juru parkir yang belum sepenuhnya menerapkan sistem karcis, yang menurutnya memerlukan perhatian lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepercayaan antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menunjukkan perkembangan positif. Kepercayaan ini terwujud melalui pendampingan penertiban, pengawasan, dan sosialisasi kepada juru parkir, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Meskipun telah mendapat apresiasi, tantangan dalam implementasi sistem karcis masih perlu disikapi dengan pengawasan yang lebih intensif. Hubungan saling percaya ini bukan hanya memperkuat koordinasi antar-lembaga, tetapi juga penting dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam mengelola perparkiran yang tertib dan aman di Kota Surabaya.

3.1.4 Kreativitas

Kreativitas memainkan peran penting dalam memperkuat sinergi antara individu atau kelompok. Dalam konteks kerja sama antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Surabaya, kreativitas diwujudkan melalui penciptaan ide-ide baru, pendekatan inovatif, dan solusi unik guna mendukung sinergi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan ketertiban dan ketenteraman perparkiran. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir liar untuk bergabung menjadi juru parkir resmi, dengan menawarkan berbagai keuntungan seperti keamanan, legalitas, serta asuransi kecelakaan dan kematian. Menurut Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan, Affan Abdillah, program ini bertujuan memberikan rasa aman bagi para juru parkir dan menjamin manfaat bagi ahli waris jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, AP., M.Si., menjelaskan bahwa Satpol PP tetap berfokus pada tugas utama menjaga ketertiban umum, namun lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketika menemukan juru parkir liar. Mereka bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memberikan pemahaman, bukan tindakan represif. Pendekatan ini

menunjukkan kreativitas dalam penegakan aturan yang lebih manusiawi dan membangun. Testimoni dari salah satu juru parkir resmi di Jalan Tunjungan, Udin, turut memperkuat keberhasilan pendekatan ini. Ia menyatakan bahwa menjadi juru parkir resmi membuatnya merasa lebih tenang karena bekerja dalam perlindungan hukum serta mendapatkan asuransi kecelakaan dan kematian. Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah menerapkan pendekatan inovatif yang berfokus pada perlindungan dan persuasi dalam mengelola perparkiran. Inovasi seperti pemberian asuransi dan legalitas kepada juru parkir resmi tidak hanya meningkatkan keamanan kerja, tetapi juga menjadi insentif efektif untuk mengurangi jumlah juru parkir liar. Pendekatan persuasif dari Satpol PP melengkapi strategi tersebut dengan cara yang tidak konfrontatif, membangun kesadaran dan kerja sama. Sinergi kreatif ini terbukti memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib dan manusiawi di Kota Surabaya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menangani permasalahan juru parkir liar di kawasan wisata telah terbangun melalui mekanisme koordinasi formal, seperti pembentukan Tim Walet dan pengawasan berbasis tiga tahap. Meski demikian, implementasi kerja sama ini di lapangan belum berjalan secara optimal karena masih ditemui berbagai kendala struktural dan sosial, seperti terbatasnya sumber daya manusia, tumpang tindih wewenang, dan rendahnya kepatuhan juru parkir liar terhadap regulasi yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mohammad Nur Shobah (2023), yang mengungkapkan bahwa sinergitas antarinstansi di Kabupaten Demak belum maksimal, meskipun telah terdapat bentuk kerja sama kelembagaan. Hambatan yang dihadapi pun serupa, yaitu terbatasnya sumber daya, lemahnya komunikasi lintas sektor, serta kurangnya integrasi program antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Demikian pula, penelitian Nurul Ansaria Iksan (2023) yang dilakukan di Kota Makassar menunjukkan bahwa koordinasi dalam penertiban parkir liar sudah berlangsung, tetapi masih menghadapi kendala teknis dan administratif, termasuk tumpang tindih peran serta lemahnya sistem integrasi antar unit kerja pemerintah.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini berbeda dari hasil studi Azzalia Nahda Firdani (2020) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 telah diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks Surabaya, Perda Nomor 3 Tahun 2018 mengenai pengelolaan perparkiran belum mampu dijalankan secara tegas, terutama karena lemahnya penindakan hukum dan tidak adanya sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku parkir liar. Di sisi lain, dalam dimensi komunikasi, hasil penelitian ini mendukung pandangan Rizka Adely Putri (2021), yang menekankan pentingnya komunikasi persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pendekatan yang digunakan Surabaya berbeda dengan kasus di Padang, di mana peran Satpol PP lebih bersifat represif. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa strategi pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan oleh aparat di Surabaya mampu membangun hubungan sosial yang lebih baik dengan para juru parkir liar, sehingga efektivitas kebijakan lebih terjaga.

Dalam hal umpan balik, penelitian ini juga menunjukkan perkembangan positif dengan adanya forum koordinasi rutin dan kanal pengaduan masyarakat yang mulai difungsikan, meskipun penerapannya belum merata di seluruh titik parkir. Temuan ini berbeda dari studi Ery Saputra (2021) di Kota Pekanbaru yang menunjukkan adanya kecenderungan praktik penyembunyian informasi dan kurangnya transparansi di Dinas Perhubungan setempat. Kepercayaan antarlembaga di Surabaya juga diperkuat dengan

adanya pengawasan sistem karcis serta transparansi pembagian wewenang, mendukung argumen Shobah (2023) bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama sinergitas. Selain itu, dimensi kreativitas dalam penelitian ini mencatat keberhasilan program pemberian asuransi bagi juru parkir resmi dan inovasi pendekatan persuasi, yang tidak ditemukan dalam studi terdahulu. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bentuk insentif dalam formalisasi parkir liar, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membina ketertiban secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan sinergis yang dijalankan oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjukkan praktik kolaborasi yang lebih adaptif dan inovatif dibandingkan dengan kota-kota lain, serta memberikan kontribusi ilmiah yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman perparkiran di kawasan wisata sudah terbentuk melalui koordinasi formal seperti Tim Walet dan pengawasan tiga tahap. Meski telah dibangun komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan regulasi, minimnya sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta resistensi dari juru parkir liar yang lebih diuntungkan di sektor informal. Dalam dimensi komunikasi, kolaborasi antara kedua instansi berjalan cukup baik melalui patroli gabungan dan pendekatan humanis, namun belum menjangkau seluruh titik parkir secara merata dan masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi penindakan. Dari sisi umpan balik, terdapat mekanisme koordinasi dan pemberian insentif bagi juru parkir resmi, namun pengawasan rutin masih belum konsisten di semua kawasan. Kepercayaan mulai terbangun melalui sosialisasi bersama, sistem karcis, dan layanan pengaduan 24 jam, walau tetap diperlukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan di lapangan. Kreativitas kedua instansi tercermin melalui program perlindungan juru parkir resmi seperti asuransi dan pendekatan persuasif yang mengedepankan edukasi ketimbang tindakan represif. Inovasi ini dinilai efektif karena mampu menciptakan rasa aman bagi juru parkir resmi, dan pada akhirnya mendukung terciptanya ketertiban perparkiran yang lebih baik di Kota Surabaya. **Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari sebagai ruang untuk pengembangan di masa mendatang. Pertama, penelitian hanya difokuskan pada kawasan wisata di Kota Surabaya, sehingga belum mencakup wilayah-wilayah lain yang mungkin memiliki karakteristik permasalahan parkir liar yang berbeda. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap data internal dari instansi terkait, seperti data keuangan retribusi parkir atau laporan pengawasan terperinci, membatasi kedalaman analisis dalam mengevaluasi efektivitas sinergitas secara kuantitatif. Keterbatasan lainnya adalah belum tergalinya secara menyeluruh perspektif dari juru parkir liar itu sendiri sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan penertiban, sehingga potensi solusi berbasis pemberdayaan ekonomi belum dibahas secara lebih komprehensif. **Arah masa depan penelitian:** arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi antarlembaga yang lebih adaptif dan berbasis teknologi dalam pengelolaan perparkiran, khususnya di kawasan wisata. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas sistem digitalisasi pengawasan parkir, termasuk integrasi aplikasi pelaporan masyarakat dan pembayaran parkir elektronik terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, studi mendalam mengenai strategi pemberdayaan ekonomi bagi juru parkir liar serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan hukum dapat

menjadi kontribusi penting dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kajian evaluatif terhadap penerapan sistem zonasi parkir juga layak dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap distribusi kendaraan, efisiensi retribusi, dan pengendalian praktik parkir liar di kawasan urban padat aktivitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak dari instansi pemerintahan daerah lainnya yang turut serta dalam diskusi, koordinasi, serta kegiatan pendukung penelitian. Dukungan dalam bentuk data, informasi, serta akses lapangan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di Kalimantan Tengah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kota Surabaya dalam angka 2023*. BPS Kota Surabaya.
- Bunda, M.R., & Tjereng, M.B.Z. (2025). Analisis Efektifitas Kebijakan Pengaduan Publik Dalam Pelayanan Administrasi Publik. *Scinentific Journal Of Refection: Economic, Accounting, management and Business*, 8910, 189-196.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Retrieved from https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Doctoroff, M. (1977). *Synergistic management: Creating the climate for superior performance*. Amacom.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. McGraw-Hill.
- Firdani, A. N. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Pungutan Liar oleh Juru Parkir. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–15. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/578Urj> UIN Malang+1Garuda Kemdikbud+1
- Ikhsan, N. A., Malik, I., & Khaerah, N. (2023). Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 230–245. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/13618Pujia> Unismuh Makassar+1Pujia Unismuh Makassar+1
- Ilham, M., & Rahman, A. (2025). Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. *AMU Press*, 1(1), 1-182.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ma, Y., Huang, Y., Miao, X., Zhang, S., Gao, J., Li, H., Yuan, M., & Hu, J. (2025). Quantitative evaluation of policy texts of hospital workplace violence prevention and control in China: Based on the PMC-Index model. *BMC Public Health*, 25(1), 846. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22011-z>
- Novianto, D., & Rosando, A. F. (2023). Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar di Kota Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581–1591.
- Prabowo, H. (2022). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bimedia Pustaka Utama.
- Putri, R. A., & Saini, Y. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

- Padang dalam Menertibkan Pelanggaran terhadap Parkir Liar. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, 12(2). <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/19753E-Jurnal> Bung Hatta+1E-Jurnal Bung Hatta+1
- Saputra, E. (2021). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Parkir Liar di Kota Pekanbaru [Skripsi]. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/11346/Repository> Universitas Islam Riau
- Shobah, M. N. (2023). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah [Skripsi] Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Si, H., Liang, J., Ke, J., Cheng, L., & De Vos, J. (2024). What limits improper bike-sharing parking most: Penalties or incentives? Findings from an online behavioral experiment. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 107, 133–148. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.09.001>
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNWTO. (2018). *Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions*. World Tourism Organization. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420070>

